



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDOARJO

JI Kombespol M Duryat No. 62 SIDOARJO  
(031) 8962904, Email: [satpolppsda@gmail.com](mailto:satpolppsda@gmail.com)  
(031)8962904 [satpolpolppsda@gmail.com](mailto:satpolpolppsda@gmail.com)

## **KATA PENGANTAR**

Kami mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Maksud disusunnya Laporan kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bentuk pengendalian dan penilaian atas kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kepada publik atas semua kinerja yang dilakukan khususnya Tahun 2020.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2020 seperti yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan, meskipun ada beberapa indikator yang capaiannya di bawah target. Pelaksanaan program kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi kinerja berbagai pihak baik intern, perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo, dan dari masyarakat luas. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Terakhir, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya bagi pihak intern Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sidoarjo, Februari 2021  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SIDOARJO**

**WIDIYANTORO BASUKI, SH.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19660228 199602 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b>	<b>ix</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1. Dasar Hukum	2
1.1.2. Tujuan Penyusunan	2
1.2. GAMBARAN UMUM OPD	2
1.2.1. Struktur Organisasi	2
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3. ASPEK STRATEGIS OPD	9
<b>BAB II PERENCANAAN KERJA</b>	<b>14</b>
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	14
2.1.1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD	14
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN	20
2.3. PERJANJIAN KINERJA	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>28</b>
3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	28
3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	37
3.4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	59
3.5. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN	63
3.6. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	64
3.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>68</b>
4.1. KESIMPULAN UMUM	68
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT	69

## **LAMPIRAN**

- **LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR / ESELON 3**
  1. **SEKRETARIS**
    - A. Capaian Kinerja Program
    - B. Laporan Realisasi Anggaran
    - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
    - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
  2. **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**
    - A. Capaian Kinerja Program
    - B. Laporan Realisasi Anggaran
    - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
    - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
  3. **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**
    - A. Capaian Kinerja Program
    - B. Laporan Realisasi Anggaran
    - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
    - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
  4. **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
    - A. Capaian Kinerja Program
    - B. Laporan Realisasi Anggaran
    - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
    - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
- **LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS / ESELON 4**
  1. **KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
    - A. Capaian Kinerja Kegiatan
    - B. Laporan Realisasi Anggaran
    - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
    - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

2. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
  - A. Capaian Kinerja Kegiatan
  - B. Laporan Realisasi Anggaran
  - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
  - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
  
3. KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
  - A. Capaian Kinerja Kegiatan
  - B. Laporan Realisasi Anggaran
  - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
  - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
  
4. KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
  - A. Capaian Kinerja Kegiatan
  - B. Laporan Realisasi Anggaran
  - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
  - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
  
5. KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
  - A. Capaian Kinerja Kegiatan
  - B. Laporan Realisasi Anggaran
  - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
  - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
  
6. KEPALA SEKSI PENGAMANAN
  - A. Capaian Kinerja Kegiatan
  - B. Laporan Realisasi Anggaran
  - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
  - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
  
7. KEPALA SEKSI SATUAN LINMAS
  - A. Capaian Kinerja Kegiatan
  - B. Laporan Realisasi Anggaran
  - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
  - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung

8. KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
  - A. Capaian Kinerja Kegiatan
  - B. Laporan Realisasi Anggaran
  - C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
  - D. Tanggapan dan Rekomendasi Atasan Langsung
  
9. POHON KINERJA

## DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HALAMAN
Tabel 2.1	: Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 Dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	
Tabel 2.2	: Matriks Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021	
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020	
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Sekretaris / Kabid ) Tahun 2020	
Tabel 2.5	: Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Kasubag/Kasi ) Tahun 2020	
Tabel 2.6	: Anggaran Per Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020	
Tabel 3.1	: Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020	
Tabel 3.2	: Hasil Pengukuran Kinerja Jangka Menengah Tahun 2020	
Tabel 3.3	: Pengukuran Kinerja Jangka Menengah Tahun 2020	
Tabel 3.4	: Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	
Tabel 3.5	: Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahun 2020	
Tabel 3.6	: Analisa Keberhasilan/Kegagalan Program dan Kegiatan Pendukung	
Tabel 3.7	: Laporan realisasi anggaran 2020	

## DAFTAR GRAFIK

NO	JUDUL GRAFIK	HALAMAN
Grafik 3.1	: Grafik Sidang TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 sd 2020	



## DAFTAR BAGAN

NO	JUDUL BAGAN	HALAMAN
Bagan 1.1	: Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Melaksanakan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Good Governance di lingkungan Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, maka setiap kinerja penyelenggara pemerintah, wajib menyusun laporan akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan.

Tujuan yang hendak dicapai berkaitan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan, yaitu :

### **“Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram”**

Adapun Sasaran yang hendak dicapai berkaitan dengan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat.
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, disampaikan sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	- Rasio anggota Satlinmas terhadap Jumlah RT	100%	Berhasil
		- Persentase pos kamling aktif	103%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan	- Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	Berhasil
		- Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	Berhasil
		- Persentase penanganan pelanggaran protokol Kesehatan yang diselesaikan	100%	Berhasil

**Sasaran 1 didukung oleh :**

1. Program Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 529.223.730 dan terealisasi sebesar Rp. 521.867.520,- atau 98,61%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
1.	Persentase satlinmas yang aktif dalam pengendalian lingkungan	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
1.	Pengerahan dan pengendalian satuan linmas	Jumlah anggota satlinmas yang aktif	500	523	104,6%
2.	Pembinaan operasional dan satuan linmas	Jumlah satuan linmas yang dibina	200	200	100%
3.	Pembinaan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan	300	300	100%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
1.	Pengerahan dan pengendalian satuan linmas	146.321.730,00	143.263.605,00	97,91
2.	Pembinaan operasional dan satuan linmas	184.832.000,00	181.264.742,00	98,07
3.	Pembinaan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan	198.070.000,00	197.772.895,00	99,85

**Sasaran 2 di dukung oleh :**

1. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 13.574.965,700 dan terealisasi sebesar Rp. 13.060.474.499 atau 96,21 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
1.	Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	45 titik	46 titik	102%
2.	Jumlah personil yang ditugaskan dalam upacara HUT dan Jambore	75 orang	0 orang	0
3.	Jumlah asset yang diamankan	3 asset	3 asset	100%

Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
	Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	45	46	102%
	Penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendali ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah personil yang ditugaskan dalam jamboree dan HUT pol pp	75	0	0%
	Pengamanan kegiatan dan asset daerah	Jumlah asset yang diamankan	3	3	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	11.861.486.900	11.411,936.546	96,21
Penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendali ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	45.000.000	0	0
Pengamanan kegiatan dan asset daerah	1.668.478.800	1.633.449.556	97,90

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 984.500.300 dan terealisasi sebesar Rp. 913.690.338,- atau 96,33 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	100%	100%

Program tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah peserta pembinaan penegakan peraturan daerah	200	200	100%
Fasilitasi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	Persentase penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%

Realisasi anggaran, sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	437.413.510,00	423.328.794,00	96,78
Fasilitasi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	511.086.790,00	488.752.297,00	95,63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, setiap unit organisasi perangkat daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja dinas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan laporan kinerja tersebut juga merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja serta pelaporan kinerja.

### **1.1.1. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Dasar Penyusunan Laporan Kinerja.

### **1.1.2. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2020. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efisien, efektif, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.2. GAMBARAN UMUM OPD**

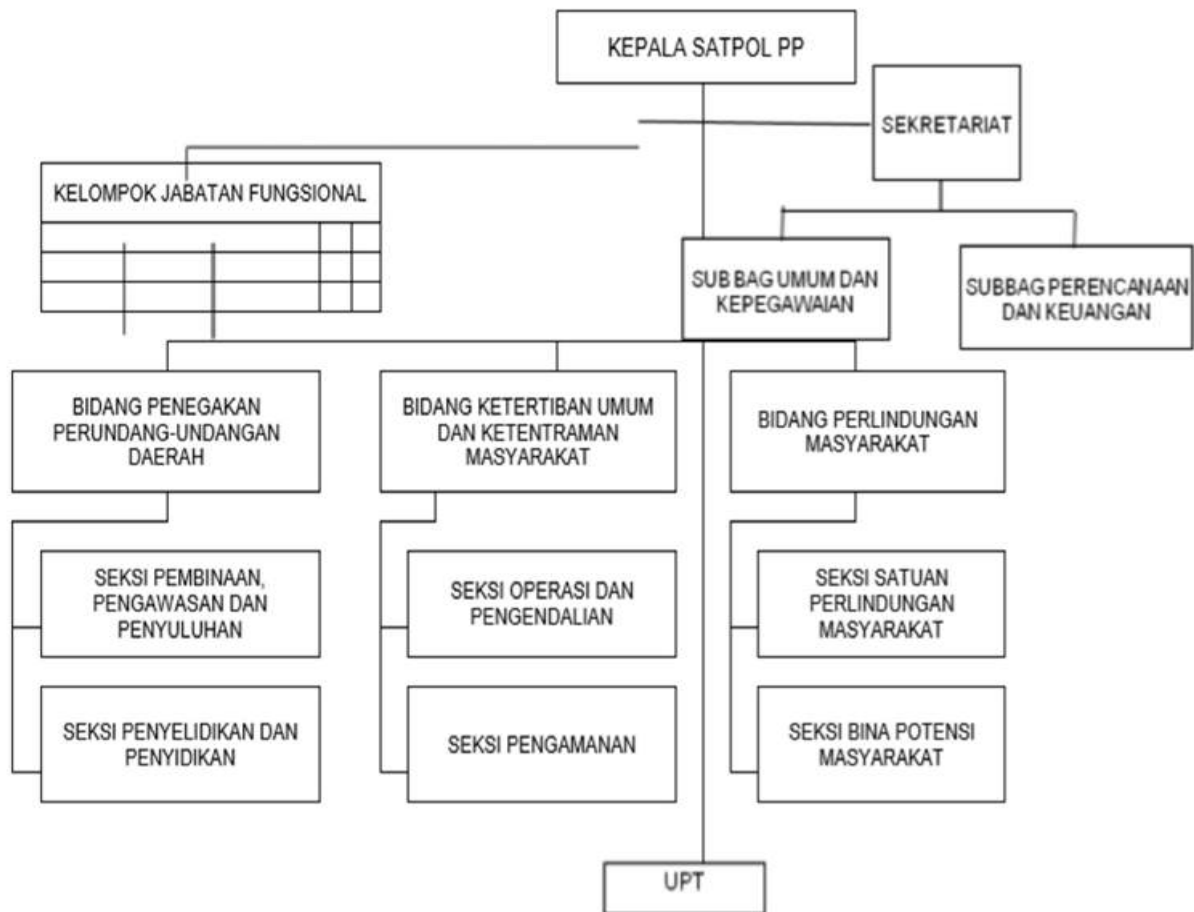
### **1.2.1. Struktur Organisasi**

Pada tahun 2020 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.



Berikut bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SIDOARJO**



### 1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara organisasi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.

Tugas pokok masing – masing unit perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. KEPALA SATUAN

Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Satpol PP.

2. SEKRETARIS

Mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Bagian Kesekretariatan mempunyai sub bagian yaitu :

a. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- 1) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program; Menyusun laporan dinas;
- 2) Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- 3) Melaksanakan administrasi keuangan;
- 4) Melaksanakan l
- 5) aporan pengelolaan keuangan;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- 1) Melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi ;
- 2) Melaksanakan pengelolaan barang ;
- 3) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut permohonan izin ; Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian ;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugasnya.

Unsur pelaksana terdiri dari :

- a. **SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN**
  - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi dan pengendalian;
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis operasi dan pengendalian meliputi :
  - 3) Pelaksanaan patroli harian serta pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - 4) Pemetaan dan deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - 5) Pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - 6) Melaksanakan kerjasama dengan POLRI, TNI dan Instansi lainnya dalam pelaksanaan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
  - 7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis operasi dan pengendalian;
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- b. **SEKSI PENGAMANAN**
  - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan;
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengamanan meliputi :
    - a) Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
    - b) Pelaksanaan pengawalan dalam kunjungan kerja Bupati, Wakil Bupati dan/atau Pejabat Pemerintah;
    - c) koordinasi pelaksanaan teknis petugas keamanan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo ;

- d) Pelaksanaan kegiatan Upacara dan Kesamaptaan Aparat Polisi Pamong Praja.
- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengamanan;
- 4) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### 4. BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugasnya.

Unsur pelaksana terdiri dari :

##### a. SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan meliputi :
  - a) Pelaksanaan tindakan preemtif dan preventif non yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
  - b) Penanganan aduan masyarakat terkait indikasi pelanggaran perundang-undangan daerah;
  - c) Pemetaan dan deteksi dini potensi pelanggaran perundang-undangan daerah.
- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- 4) Melaksanakan tugas ketata usahaan bidang;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. **SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan meliputi :
  - a) Koordinasi pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
  - b) Fasilitasi penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah terkait hasil penyelidikan yang terindikasi terdapat pelanggaran perundang-undangan daerah;
  - c) Fasilitasi sarana prasarana persidangan tipiring di tempat yang dilakukan Pengadilan dan Penuntut Umum terhadap hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

5. **BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugasnya.

Unsur pelaksana terdiri dari :

a. **SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis satuan perlindungan masyarakat;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis satuan perlindungan masyarakat meliputi :
  - a) Koordinasi teknis operasional pembinaan dan pengembangan anggota Satlinmas bersama-sama dengan Camat dan Kasatlinmas Desa/Kelurahan;

- b) Koordinasi pengerahan Anggota Satlinmas oleh Kasatlinmas Desa/Kelurahan serta pengendaliannya dalam kegiatan kesiagaan atau penanggulangan bencana;
  - c) Pelaksanaan kegiatan upacara dan Kesamaptaan anggota Satlinmas;
  - d) Pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengamanan swakarsa meliputi pencegahan, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis satuan perlindungan masyarakat;
  - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina potensi masyarakat;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina potensi masyarakat :
  - a) koordinasi pelaksanaan teknis Pembinaan Potensi Masyarakat dalam peran serta Perlindungan Masyarakat;
  - b) pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam peran serta Perlindungan Masyarakat;
  - c) pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiagaan dan kewaspadaan dini lingkungan;pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiagaan dan kewaspadaan dini lingkungan.
- 3) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina potensi masyarakat;
- 4) melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### 1.3. ASPEK STRATEGIS OPD

Jumlah Total Anggota

Satpol PP

- Laki-laki : 292 orang
- Perempuan : 15 orang

Status

- PNS : 100 orang
- Non PNS : 192 orang

Jumlah PPNS : 6 orang

Tingkat Pendidikan :

- S2 : 1 orang
- S1 : 20 orang
- SLTA : 270 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : -

Kepangkatan/Golongan

- I : -
- II : 88 orang
- III : 10 orang
- IV : 2 orang

Jenis Kediklatan

- Struktural : 13 orang
- Fungsional : 46 orang
- Diklatsar Satpol PP : 55 orang

## DATA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

(Sesuai Permendagri 17 Tahun 2019)

No	Sarana dan Prasarana	Ada	Tidak Ada	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Gedung Kantor</b>	✓		1	
1	ruang kerja pimpinan dan staf;	✓		1	
2	ruang pos jaga;	✓		1	
3	ruang rapat;		✓	-	
4	ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;	✓		1	
5	ruang penyimpanan barang/gudang;	✓		1	
6	ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;	✓		1	
7	ruang sidang majelis kode etik;	✓		1	
8	tempat apel/upacara; dan	✓		1	
9	halaman parkir.	✓		1	
<b>B</b>	<b>Kendaraan operasional Satpol PP</b>				
10	sepeda motor	✓		108	
11	jenis offroad/jeep / Pamwal	✓		1	
12	Mini Bus atau Van	✓		11	
13	Truk kecil	✓		12	
14	Truk sedang	✓		3	
15	truk besar	✓		6	
16	kendaraan lain		✓	-	
<b>C</b>	<b>Perlengkapan Operasional</b>				
<b>I</b>	<b>Perorangan</b>				
17	pakaian dinas;	✓		291	
18	tonfa dan holster tonfa;		✓	-	
19	borgol;		✓	-	
20	tameng;	✓		40	
21	senter;	✓		25	
22	ferplas;	✓		6	
23	tas atau ransel;		✓	-	
24	sleeping bag;	✓		3	
25	jaket;	✓		291	
26	rompi/body protector; dan		✓	-	
27	masker.	✓		291	
<b>II</b>	<b>Perlengkapan Beregu</b>				
28	Matras	✓		30	
29	Tenda Peleton	✓		1	



30	peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi		✓	-	
31	Telepon	✓		1	
32	RIG	✓		1	
33	Handy Talky	✓		20	
34	Repeater		✓	-	
35	GPS		✓	-	
Total Sarana dan Prasarana				1150	

#### 1. Isu Strategis Yang Dihadapi

Atas berbagai gambaran situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Sidoarjo, maka bias diketahui beberapa isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2016-2021 sesuai yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 serta yang tertuang pada Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020. Selanjutnya beberapa isu strategis di atas dijabarkan lagi dengan menghubungkan beberapa alternative penyelesaian maka bisa dijabarkan seperti tabel berikut :

**Tabel 1.1** Isu Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Alternatif Penyelesaian

No	Isu- Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021	Alternatif Penyelesaian
1	Meningkatnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan konflik</li> <li>2. Mengendalikan konflik/kerawanan</li> <li>3. Kesamaptaan</li> <li>4. Patroli wilayah</li> </ol>
2	Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan rasio petugas linmas</li> <li>2. Kapasitas/ketrampilan anggota satlinmas</li> </ol>
3	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Kualitas dan kuantitas personil penegakan perda</li> <li>3. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait</li> </ol>

Isu-isu strategis dan alternatif penyelesaian masalah yang tersebut diatas dihubungkan dengan sasaran strategis (sasaran utama), sasaran program dan kegiatan secara berjenjang sehingga realisasi program dan kegiatan diharapkan dapat mendukung tercapainya target sasaran strategis.

Dari isu-isu strategis yang mengemuka dan tertuang pada Rencana Strategis selanjutnya dipergunakan sebagai dasar perencanaan Tahun 2020. Beberapa permasalahan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah :

1. Masalah PKL yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam penataan kota dan kebutuhan masyarakat kecil dalam mencari nafkah;
2. Masalah perizinan sektor usaha berkaitan pengaturan dan pengawasan antara lain: penanaman modal, tata kota, lingkungan hidup, iklan, kebutuhan masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan, tenaga kerja dan lain sebagainya;
3. Tumbuhnya bangunan liar sebagai akibat dari arus urbanisasi masyarakat miskin ke kota untuk mencari kerja dan mendirikan usaha/rumah di bantaran sungai, jalan raya, rel, dan tanah-tanah kosong yang tidak dikontrol oleh pemiliknya;
4. Perbuatan asusila sebagai salah satu indikator lemahnya kontrol agama di masyarakat, perubahan budaya sebagai dampak globalisasi, kebutuhan mencari uang dengan cara-cara yang mudah;
5. Gepeng dan anjal sebagai dampak kemiskinan yang memunculkan salah satu cara lain untuk mencari uang, dan remaja yang putus sekolah baik karena faktor ekonomi ataupun faktor ketidakharmonisan keluarga;
6. Penduduk tanpa identitas kependudukan (Kartu Tanda Penduduk) atau beridentitas ganda sebagai akibat urbanisasi yang tidak taat atau tidak mengerti syarat administrasi kependudukan atau ada kepentingan perorangan atau kelompok tertentu;
7. Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai aturan yang mengganggu estetika kota;
8. Munculnya cafe-cafe liar yang meresahkan warga sekitar;
9. Permasalahan ketenagakerjaan yang tidak kunjung usai;
10. Ancaman akan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan aset pemerintah daerah, kegiatan pemerintah dan masyarakat;
11. Masih rendahnya tingkat SDM dan ethos kerja aparat Polisi Pamong Praja;
12. Kelengkapan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang memadai;
13. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan di sekitarnya;

14. Tingkat pengaduan masyarakat akan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang semakin meningkat, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya.
15. Penanganan pelanggaran tibumtranmas sebagai dampak langsung dari pandemi corona virus disease atau covid -19 yang terjadi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KERJA**

#### **2.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **2.1.1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD**

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, dimana perencanaan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja yang selanjutnya hasil dari penilaian kinerja tersebut disusun dalam suatu dokumen yang akan membentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja perangkat daerah terdiri dari 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2) Rencana Kerja (RENJA) 3) Perjanjian Kinerja yang didalamnya disebut juga Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk penilaian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 beberapa dokumen yang dijadikan acuan akan dijelaskan pada bab II ini.

**Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo**

<b>Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>Tujuan RPJMD Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>Tujuan Renstra OPD</b>	<b>Sasaran Renstra OPD</b>
<p>Misi 5 : Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban</p>	<p>Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan</p>	<p>Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum dalam masyarakat yang berbudaya</p>	<p>Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan ten</p>	<p><b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat</p> <p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah</p>

**1. Matriks Renstra**

**Tujuan Renstra : Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram**

**Indikator Tujuan : Indeks rasa aman**

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PENGHITUNGAN	Tahun Dasar	TARGET					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	PROGRAM	KEGIATAN	
					2017	2018	2019	2020	2021			
1	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT	<b>Definisi operasional :-</b>  Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan kelinmasan  <b>Formulasi</b>	1 : 0,86	1 ; 0,90	1 : 0,95	1 : 1	1 : 1,1	1 : 1,2	Program Perlindungan Masyarakat	1. Pengerahan dan pengendalian satuan linmas 2. Pembinaan potensi masyarakat dalam pengendalian keamanan lingkungan 3. Pembinaan operasional dan pengembangan satuan linmas	Bidang Perlindungan Masyarakat  1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

			<b>Penghitungan :</b> Jumlah Anggota Satlinmas dibagi Jumlah RT										
		Persentase pos kamling aktif	<b>Definisi Operasional</b> Pos Kamling adalah pos keamanan, merupakan pos jaga bagi para linmas atau yang biasa berjaga dimalam hari demi untuk keamanan blok , kampung maupun desa dimana mereka bertempat atau bertugas. <b>Formulasi</b> <b>Penghitungan :</b> Jumlah pos kamling aktif dibagi total jumlah total pos kamling dikali 100%	N/A	N/A	30 %	32%	32%	34 %				

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PENGHITUNGAN	Tahun Dasar	TARGET					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	PROGRAM	KEGIATAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA										
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan</li> <li>- Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan</li> <li>- Persentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran</li> </ul>	<p><b>Formulasi Penghitungan</b> Gangguan trantibum yg diselesaikan dibagi gangguan trantibum yg ditangani dikali 100%</p> <p>Pelanggaran perda yang diselesaikan dibagi pelanggaran perda yang dipantau/ditemukan dikali 100%</p> <p>Titik lokasi bebas pelanggaran perda dibagi</p> <p>Titik lokasi yang ditentukan dikali 100%</p> <p><b>Definisi</b></p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>Program pembinaan operasional, dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah</p>	<p>1. Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>2. Pengamanan kegiatan dan aset daerah</p> <p>1. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah</p> <p>2. Fasilitasi</p>	<p>Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>1. Seksi Operasi dan Pengendalian</p> <p>2. Seksi Pengamanan</p> <p>Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah</p> <p>1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan</p>



		peraturan daerah	<b>Operasional :</b> Diselesaikan adalah tuntasnya penanganan pelanggaran dengan tindakan non yustisial berupa pemberian sanksi administratif seperti teguran, peringatan, pencabutan ijin, pembongkaran dan/atau tindakan yustisial berupa pengajuan ke pengadilan								penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah	Penyuluhan 2. Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program			Kegiatan			Anggaran
			Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan Prosentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan Prosentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda	100%	Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan wilayah patroli	18 Kec	Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2. Jumlah Patroli yang dilakukan	34 titik 1095 patroli 75 orang	4.034.443.640
		100%		Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindak	100%				
		100%		Persentase kondisi aman dalam pengamanan kegiatan dan aset daerah	B (baik) 76,61 - 88,30				
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendalik etertiban umum danketentraman masyarakat dalam rangka upacara dan jambore	Jumlah Penghargaan yang diperoleh	1 penghargaan	50.000.000

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program			Kegiatan			Anggaran
			Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	
<b>LANJUTAN</b>			Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	1. Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan 2. Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang ditemukan dan ditindaklanjuti	200 org  615 Kasus	368.847.400
						Fasilitasi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	Persentase penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah yang difasilitasi	100%	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program			Kegiatan			Anggaran
			Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	
Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	1. Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT	1 : 1	Program Perlindungan Masyarakat	Prosentase anggota Satlinmas yang aktif dalam melaksanakan fungsi linmas	100%	Pengerahan dan pengendalian satuan linmas	Jumlah anggota Satlinmas yang aktif	700 Orang	101.055.700
	2. Persentase Pos Kamling Aktif	32%				Pembinaan potensi masyarakat dalam pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan tentang keamanan lingkungan	1200 personil	283.142.000
						Pembinaan operasional dan pengembangan satuan linmas	Jumlah Satlinmas yang dibina	425 orang	116.628.525

## 2.3. PERJANJIAN KINERJA

### Perjanjian Kinerja Kepala OPD

Berikut ini Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 beserta rincian anggaran per Program / Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio anggota Satlinmas terhadap Jumlah RT	1 : 1
		Persentase Pos Kamling Aktif	31%
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	- Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100 %
		- Persentase penanganan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang diselesaikan	100%
		- Persentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran Peraturan Daerah	100%
		- Persentase penanganan pelanggar protokol Kesehatan yang diselesaikan	100%

#### 1. Perjanjian Kinerja Eselon III

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	86%	Sekretaris
2	Meningkatnya akses ketertiban dan ketentraman masyarakat	- Cakupan wilayah patroli - Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindak - Prosentase kondisi aman dalam pengamanan kegiatan dan aset daerah yang dilaksanakan	18 Kecamatan 100% 100%	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam ketertiban dan ketentraman	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ketertiban dan ketentraman	76,61 – 88,30 Baik	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

	ketentraman			
4	Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100 %	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
5	Meningkatnya kinerja anggota satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persentase anggota Satlinmas yang aktif dalam pengendalian lingkungan	95 %	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

## 2. Perjanjian Kerja Eselon IV

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersedianya barang/jasa perkantoran	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	1600	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2		Jumlah pengelola keuangan dan pengelola barang yang di bayar	192	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3		Jumlah BBM yang disediakan	70000 ltr	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4		Jumlah STNK kendaraan dinas yang luas pajaknya	64 unit	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5		Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	3000	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7		Jumlah bahan buku bacaan dan koran yang tersedia	3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8		Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	100	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9		Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	25 jenis	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

10		Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11	Terlaksananya kegiatan kedinasan dalam dan luar daerah	Persentase surat perintah tugas yang di tindaklanjuti	100%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas Gedung kantor yang dipelihara	1000 M2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	64 unit	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14		Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	130 unit	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15	Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapan atribut aparatur	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur	485 buah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		Jumlah pakaian hari hari tertentu yang tersedia	122 buah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran , data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dok	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	2 dok	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
19		Jumlah data dan informasi yang disusun	1 dok	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
20		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	2 lap	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah laporan keuangan PD yang disusun	1 lap	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
21	Pelaksanaan patroli ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	Jumlah patroli yang dilakukan	1095 patroli	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
22	Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah titik yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masy.	32 titik	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

23	Perolehan peringkat / prestasi dalam kegiatan HUT/Jambore	Jumlah personil yang ditugaskan dalam rangka upacara dan jambore	75 orang	Kepala Seksi Pengamanan
24	Pengamanan kegiatan daerah	Jumlah kegiatan daerah yang diamankan	80 kegiatan	Kepala Seksi Pengamanan
25	Pengamanan aset daerah	Jumlah aset daerah yang diamankan	3 aset	Kepala Seksi Pengamanan
26	Penyelenggaraan pembinaan penegakan peraturan daerah	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan Per-UU-an Daerah	1700 orang	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
27	Terkendalnya kasus pelanggaran peraturan daerah	Jumlah kasus pelanggaran Per-UU-an daerah yang ditemukan	425 Kasus	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
28	Terfasilitasi penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah	Prosentase penanganan kasus pelanggaran Per-UU-an Daerah yang terfasilitasi	100 %	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
29	Tersedia anggota satlinmas yang aktif	Jumlah anggota Satlinmas yang aktif	600	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
30	Penyelenggaraan pembinaan satuan linmas	Jumlah Satuan Linmas yang dibina/dilatih	900 personil	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
31	Penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat dalam keamanan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan keamanan lingkungan	700 orang	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat



### 3. Anggaran Per Program / Kegiatan

Anggaran per program/kegiatan satuan polisi pamong praja kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp. 5.880.830.115,00,-
2	Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Rp. 7.625.223.600,00,-
3	Program pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	Rp. 1.125.312.730,00,-
4	Program perlindungan masyarakat	Rp. 798.271.100,00,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan yang disusun secara periodik. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas hasil kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan akuntabilitas perangkat daerah diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Bab ini akan membahas tentang capaian kinerja organisasi yang berisi pencapaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran dan pencapaian kinerja yang berisi uraian tentang keberhasilan mencapai target kinerja dan pembahasan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2020.

#### **3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 3.1** Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	- Rasio anggota Satlinmas terhadap Jumlah RT	1 : 1,1	1 : 1,1	100%
		- Persentase pos kamling aktif	32%	33%	103%
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan	- Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%
		- Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%
		- Persentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah	100%	100%	100%
		- Persentase penanganan pelanggar protokol Kesehatan yang diselesaikan	100%	100%	100%

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, disebutkan ideal komposisi personil Satlinmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah personil Satlinmas berbanding dengan jumlah RT (Rukun Tetangga). Pencapaian target dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat. Secara eksplisit kegiatan dimaksud berupa Sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi keberadaan dan partisipasi satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran utama *locus* sosialisasi

ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmasnya. Pada tahun 2020 rasio anggota satlinmas terhadap jumlah RT dapat memenuhi target yang ditetapkan hal tersebut dikarenakan beberapa factor yang mempengaruhi salah satunya adalah Rata rata personil anggota linmas di desa/kelurahan sudah lanjut usia, Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan, Desa/kelurahan masih banyak yang belum memahami fungsi kelinmasan.pada tahun 2020 dari semua indikator yang ada di IKU telah mencapai target yang telah di tetapkan bahkan ada yang melebihi 100 persen yaitu pada indikator persentase pos kamling aktif, hal tersebut menandakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja memiliki kinerja yang tinggi dan dikatakan sangat berhasil.

Namun demikian beberapa hal perlu menjadi focus bagi perbaikan kinerja satpol pp ke depan. Pertama walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan persoalan dimasyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan tantangan ini terutama Nampak dalam kondisi terkait berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana masih banyak masyarakat yang awam akan peraturan perundang undangan, kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tidak kondusif dikarenakan konflik antar masyarakat serta konflik antar kepentingan dimana peran satpol pp diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara dengan menyediakan pelayanan dasar pada urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

### **3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 dilakukan terhadap capaian kinerja strategis, capaian kinerja program (outcome) dan capaian kinerja kegiatan (output). Sasaran kinerja strategis diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU), sementara sasaran program atau keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator program dan sasaran kegiatan hasil (output) atau keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan di awal tahun dengan realisasi pada akhir tahun sehingga diperoleh capaian kinerjanya juga membandingkan capaian tahun ini dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu serta membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir RPJMD untuk beberapa program yang relevan dan disertai dengan pembahasan factor pendorong dan factor penghambat terhadap pencapaian kinerja.

Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

### 1. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Pengukuran kinerja jangka menengah / tujuan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tujuan di Tahun 2020 dengan target dari indikator kinerja tujuan di Tahun 2021. Hasil pengukuran kinerja jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2** Hasil pengukuran kinerja jangka menengah satuan polisi pamong praja kabupaten Sidoarjo tahun 2020

No.	TUJUAN	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Kinerja Tujuan	Tahun 2020	Tahun 2020	%
1	Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram	Indeks rasa aman	76,18 (Rasa Aman Tinggi)	76,03% (Rasa Aman Tinggi)	99,80%

### 2. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

#### a. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s/d Tahun 2020	Target s/d Tahun 2021	Capaian (%)
1	Indeks Rasa Aman	76,03	76,25	99,7%

Setelah dilakukan pengukuran kinerja jangka menengah maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan Analisa terhadap progress hasil capaian kinerja yaitu dengan mengukur target di tahun 2020 dengan target di akhir tahun rencana strategis satuan polisi pamong praja kabupaten Sidoarjo tahun 2016 - 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa satuan polisi pamong praja kabupaten Sidoarjo mempunyai satu tujuan yaitu indeks rasa aman.

Agar target di tahun 2021 dapat tercapai maka upaya yang dilakukan adalah akan dilakukan kajian terhadap indikator tersebut yang di rencanakan tiap tahun dilakukan kajian yang dilakukan oleh leading sector yaitu badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Sidoarjo.

Indeks Rasa Aman digunakan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Target yang ditetapkan di tahun 2020 dalam RPJMD untuk indeks rasa aman adalah 76,18% , sedangkan capaian tahun 2020 adalah 76,03%, sehingga tercapai 99,80%.

Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia salah satunya yaitu kebutuhan akan ketentraman.

Mendasari definisi rasa aman diatas, indeks rasa aman dalam hal ini dapat diartikan sebagai petunjuk angka sebagai tolak ukur untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana tingkat rasa aman/nyaman/ketentraman yang dirasakan warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Pada tahun 2020 telah dilakukan survey/pengukuran indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo, dengan responden 150 orang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan memperoleh hasil Nilai Indeks Rasa Aman 76,03 % dengan kategori Rasa Aman Tinggi.

#### **b. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi tahun 2020
1	Indeks Rasa Aman	73,89%	76,01%	76,03%

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan.

#### **c. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah**

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Indeks Rasa Aman	76,03	76,25	99,71%

Indeks rasa aman di kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Diharapkan sampai dengan masa akhir jabatan bupati Sidoarjo periode 2016-2021 capaiannya melebihi dari target yang sudah di tetapkan yaitu sebesar 76,25%. Perlu ditambahkan lagi indikator-indikator lain dari rasa aman yang sudah disesuaikan dengan situasi kondisi terkini, jadi isu-isu strategis yang sedang menjadi

permasalahan di Kabupaten Sidoarjo pada saat kajian dibuat bisa dimunculkan misalnya aman dari banyaknya sampah, kemudian aman dari informasi-informasi yang kurang jelas. Disamping karena faktor diatas, yang tidak kalah penting adalah dalam pembinaan masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek artinya masyarakat tidak lagi berdiam diri di rumah tetapi harus Bersama sama dengan aparat desa atau kelurahan melakukan pengamanan secara swadaya.

### 3. Pengukuran Kinerja Tahunan

Pengukuran kinerja tahunan atau sasaran tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target kinerja di tahun 2020 sebagaimana yang di tetapkan oleh rencana strategis tahun 2016-2021 satuan polisi pamong praja kabupaten Sidoarjo . Pengukuran kinerja tahunan atau sasaran satuan polisi pamong praja tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.3** Pengukuran kinerja satuan polisi pamong praja tahun 2020

NO	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	- Rasio anggota Satlinmas terhadap Jumlah RT	1 : 1,1	1 : 1,1	100%
		- Persentase pos kamling aktif	32%	33%	103%
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan	- Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%
		- Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%
		- Persentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah	100%	100%	100%
		- Persentase penanganan pelanggaran protokol kesehatan yang diselesaikan	100%	100%	100%

### 4. Pengukuran kinerja program dan kegiatan

Pengukuran kinerja program dan kegiatan tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja program dan kegiatan di tahun 2020 dengan target dari indikator kinerja program dan kegiatan di tahun 2020 sebagaimana pada renja tahun 2020 satuan polisi pamong praja kabupaten Sidoarjo

**Tabel 3.4** Pengukuran kinerja program dan kegiatan tahun 2020

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program/kinerja kegiatan	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian %
<b>1</b>	<b>Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b>	<b>Cakupan wilayah patroli</b>	<b>18 kecamatan</b>	<b>18 kecamatan</b>	<b>100%</b>
	Kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah patroli yang dilakukan	1095 kali	1095 kali	100%
	Kegiatan penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendali ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah personil yang ditugaskan dalam rangka upacara dan jambore	75	0	0%
	Kegiatan pengamanan kegiatan dan aset daerah	Jumlah aset yang diamankan	3 unit	3 unit	100%
<b>2</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan penegakan perda</b>	<b>Persentase kasus pelanggaran perda yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan perda	Jumlah peserta pembinaan penegakan perda	200	200	100%
	Kegiatan fasilitasi penyidikan penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran perda	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda yang difasilitasi	100%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Program perlindungan masyarakat</b>	<b>Persentase satlinmas yang aktif dalam pengendalian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



		<b>lingkungan</b>			
	Kegiatan pengerahan dan pengendalian satuan linmas	Jumlah anggota satlinmas yang aktif	500	500	100%
	Kegiatan pembinaan operasional dan satuan linmas	Jumlah satuan linmas yang dibina	300	300	100%
	Kegiatan pembinaan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan tentang keamanan lingkungan	200	200	100%

## 5. Analisis pencapaian kinerja tahunan

### a. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1	Rasio anggota Satlinmas terhadap Jumlah RT	1: 1,1	1: 1.1	100%
2	Persentase pos kamling aktif	32%	33%	103%
3	Persentase penanganan gangguan tibuntranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%
5	Persentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah	100%	100%	100%
6	Persentase penanganan pelanggar protokol Kesehatan yang diselesaikan	100%	100%	100%

Dari 2 indikator kinerja utama (IKU) pada 5 sasaran strategis yang ditetapkan sebagai target kinerja organisasi pada tahun 2020, semua target yang sudah ditetapkan tercapai dengan kategori baik.

Indikator kinerja program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 ada sejumlah 6 indikator. dari 6 indikator tersebut, 1 diantaranya bisa mencapai target kinerja (realisasi kinerja >100%) dan memiliki predikat pencapaian sangat berhasil.

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target pada masing masing indikator secara umum adalah :

1. Perencanaan dan penanganan yang baik,
2. Dana yang mencukupi,
3. Tercukupinya jumlah dan kapasitas personil yang melaksanakan program/kegiatan tersebut,
4. Sarana dan prasarana kerja yang mencukupi, 5) animo masyarakat dalam mendukung kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dan pembentukan satuan keamanan lingkungan sehingga masyarakat melakukan swadaya.

Sementara itu kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator dan yang juga menyebabkan rendahnya pencapaian fisik dan penyerapan keuangan sehingga menyebabkan tidak efisiennya kinerja program/kegiatan secara umum adalah

1. Tidak baiknya perencanaan dan penganggaran pada beberapa kegiatan
2. Kurangnya kemampuan personil yang melaksanakan kegiatan tersebut.

**Tabel 3.5** Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Rasio anggota Satlinmas terhadap Jumlah RT	1:0,95	1:1	1:1,1
2	Persentase pos kamling aktif	30%	32%	33%
3	Persentase penanganan gangguan tibusmanas yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%
5	Persentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah	100%	100%	100%
6	Persentase penanganan pelanggar protokol Kesehatan yang diselesaikan	100%	100%	100%

**Tabel 3.6** Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian
----	---------------------------	----------------------	-------------------	---------

1	Rasio anggota Satlinmas terhadap Jumlah RT	1:1.1	1:1,1	100%
2	Persentase pos kamling aktif	32%	33%	103%
3	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%
5	Persentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah	100%	100%	100%
6	Persentase penanganan pelanggar protokol Kesehatan yang diselesaikan	100%	100%	100%

### 3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

#### 1. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	% Capaian	Kategori	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram	Indeks rasa aman	99,8%	Berhasil	Satpol PP

Analisis keberhasilan dan kegagalan

Indeks Rasa Aman digunakan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Target yang ditetapkan di tahun 2020 dalam RPJMD untuk indeks rasa aman adalah 76,18%, sedangkan capaian tahun 2020 adalah 76,03%, sehingga tercapai 99,8%. Pada tahun 2020 telah dilakukan survey/pengukuran indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo, dengan responden 150 orang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan memperoleh hasil Nilai Indeks Rasa Aman / IRAn =  $60 < \text{IRA} < 80$  dengan kategori Rasa Aman Tinggi. Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan Analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja beserta upaya-upaya yang dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

#### 2. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

Setelah dilakukan pengukuran kinerja tahunan maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian kinerja yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilan kinerja OPD yang di jabarkan dalam tabel sebagai berikut :

### Pengukuran Keberhasilan Kinerja OPD

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Capaian (%)	Kategori	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	100%	Tinggi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Program :</b> Perlindungan Masyarakat	100%	Tinggi	Bidang Perlindungan Masyarakat
<b>Kegiatan :</b>			
a. Pengerahan dan pengendalian satuan linmas	100 %	Tinggi	Seksi Satlinmas
b. Pembinaan operasional dan pengembangan satuan linmas	100%	Tinggi	Seksi Bina Potensi Masyarakat
c. Pembinaan potensi masyarakat dalam pengendalian keamanan lingkungan	100 %	Tinggi	Seksi Bina Potensi Masyarakat
<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	100%	Tinggi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Program :</b> Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100%	Tinggi	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
<b>Kegiatan :</b>			
a. Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	98,6 %	Sangat Tinggi	Seksi Operasi dan Pengendalian
b. Penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendali ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka upacara dan jambore	100%	Tinggi	Seksi Pengamanan
c. Pengamanan kegiatan dan aset daerah	131%	Sangat Tinggi	Seksi Pengamanan
<b>Program :</b> Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	100%	Tinggi	Bidang Penegakan Perundangan Daerah

<b>Kegiatan :</b> a. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	91,94%	Tinggi	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
b. Fasilitasi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	100%	Tinggi	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

### 3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan kinerja, beserta upaya-upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat

Kendala / permasalahan yang dihadapi :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

- a. minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan
- b. Pemerintah desa/kelurahan masih banyak yang belum memahami fungsi kelinmasan dan belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan linmas
- c. Personil linmas banyak sudah lanjut usia dan tidak ada regenerasi

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Melakukan sosialisasi terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan tentang tugas pokok dan fungsi linmas;
- b. Mengirim surat himbuan ke Pemerintah Desa/Kelurahan tentang perekrutan anggota linmas;

- c. Memberikan pemahaman dan penjelasan ke desa/kelurahan berkaitan tentang pentingnya perekrutan anggota linmas;

Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

- a. Melakukan inventarisasi dan menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT
- b. Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan Satlinmas di setiap RT kepada Kepala Desa/lurah dan Kepala RW
- c. Melakukan Sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada Camat, Kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM
- d. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pelatihan terhadap anggota linmas
- e. Meningkatkan pengendalian dan pengorganisasian terhadap pengerahan anggota Linmas.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah**

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- a. Pelaksanaan sanksi administrasi belum berjalan dengan optimal (OPD pengampu perda belum optimal melaksanakannya) Kebanyakan perda yang ada saat ini memuat sanksi 6 (enam) bulan sehingga dalam penegakannya membutuhkan waktu yang lama (pemberkasan biasa
- b. Tidak sebandingnya jumlah personil yang ada dengan luas wilayah
- c. Kurangnya sarana dan prasarana khususnya untuk mobilisasi personil
- d. Koordinasi antar OPD yang belum berjalan dengan baik

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Telah mengajukan permohonan perubahan perda dengan sanksi 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan pada tahun 2016, berkoordinasi dengan OPD teknis/pengampu perda namun masih belum mendapat dukungan yang optimal
- b. Menyusun perhitungan kekurangan personil sebagai dasar pengajuan usulan penambahan personil
- c. Melakukan inventarisir sarana dan sarana yang sudah ada baik terkait kelayakan maupun jumlah serta mengajukan usulan penambahan sarana dan prasarana
- d. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan OPD teknis guna menunjang sinkronisasi kegiatan maupun sasaran

Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

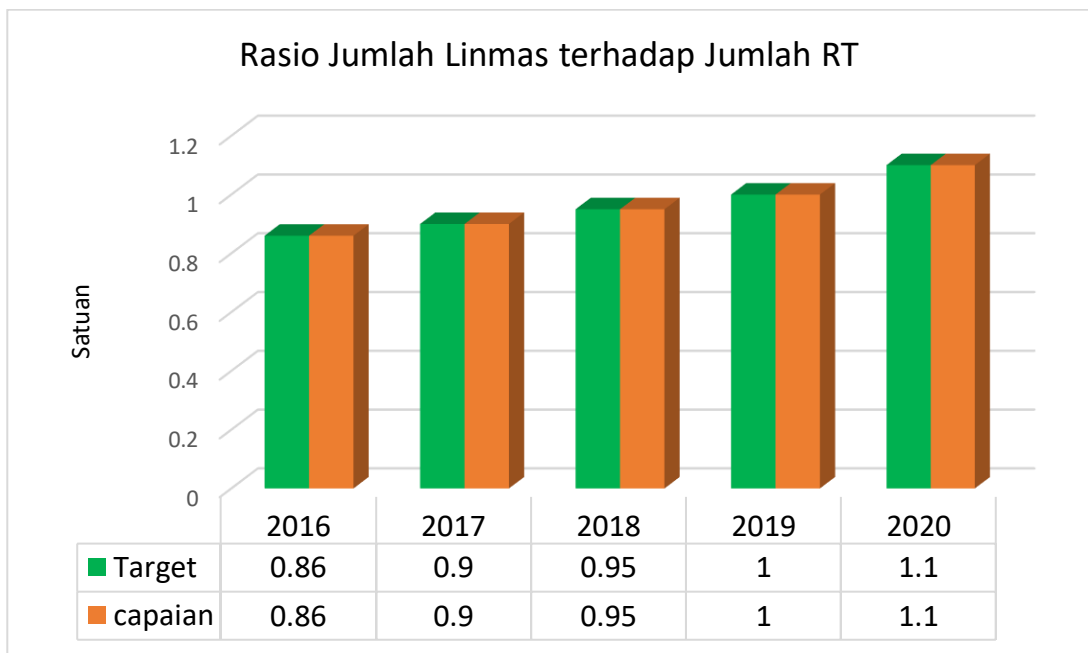
- a. Melakukan perekrutan tenaga kontrak baru guna mendukung kurangnya personil dilapangan
- b. Memaksimalkan penegakan perda yang saat ini sudah dilaksanakan dan meningkatkan cakupan perda yang ditegakkan dari yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya.
- c. Menambah sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan dan pencapaian target kinerja

#### 4. Analisis dan Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

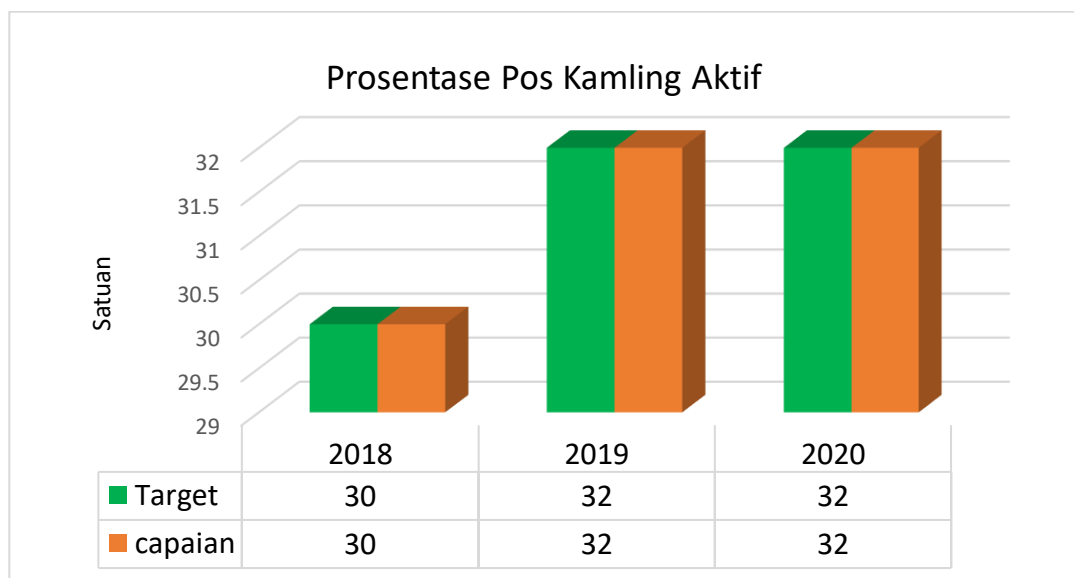
INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT	1 : 0,86	1 : 0,86	100	1 : 0,90	1 : 0,90	100	1 : 0,95	1 : 0,95	100	1 : 1	1 : 1	100	1 : 1,1	1 : 1,1	100
Persentase pos kamling aktif	nA	nA	nA	nA	nA	nA	30 %	30 %	100	32 %	32 %	100	32 %	32 %	100

**a. Perkembangan / tren capaian kinerja**

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat







Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2020 tercapai, hal ini dikarenakan pembinaan kolektif dan pelatihan satlinmas seperti simulasi pengamanan pemilu dan simulasi tanggap bencana dan Optimalisasi pencerahan kepada masyarakat berkaitan tentang urgensi keberadaan satlinmas dan pos kamling.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan Optimalisasi masing-masing

Kegiatan dengan memaksimalkan keberadaan Koordinator Lapangan (KORLAP) yang membawahi beberapa kecamatan

Apabila dibandingkan dengan proyeksi target tahun 2021, maka progres capaian kinerja tahun 2020 adalah 92,15 % dari target, melalui upaya sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran sosialisasi ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmasnya.

**Permasalahan :**

1. Keterbatasan personil dan SDM pada bidang Linmas pada aspek koordinator lapangan sehingga kurang memadai untuk intensitas koordinasi, sosialisasi dan mobilisasi linmas di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo .
2. Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan
3. Pemerintah desa/kelurahan masih banyak belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan linmas.
4. Rata - rata personil anggota linmas sudah lanjut usia.

### **Solusi :**

1. Optimalisasi fungsi koordinator lapangan dalam pengaturan kegiatan sosialisasi dan mobilisasi linmas ;
2. Optimalisasi fungsi pembinaan baik terhadap personil linmas dan masyarakat pada umumnya perihal fungsi linmas.

### **Program dan Kegiatan**

1. Untuk mencapai sasaran 1 didukung dengan program dan kegiatan sbb:  
**Program Perlindungan masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp. 529.223.730,- dan terealisasi sebesar Rp. 481.223.137,- atau 90,93% dengan indikator kinerja yaitu :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET Tahun 2020</b>	<b>REALISASI Tahun 2020</b>	<b>PERSENTASE</b>
Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT	1 : 1,1	1 : 1,1	100%
Persentase pos kamling aktif	32%	32%	100%

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET Tahun 2020</b>	<b>REALISASI Tahun 2020</b>	<b>%</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>%</b>
Pengerahan dan pengendalian satuan linmas	Jumlah anggota Satlinmas yang aktif	500 Orang	500 Orang	100	146.321.730,00	143.263.605,00	97,91
Pembinaan operasional dan pengembangan satuan linmas	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan	200 personil	200 personil	100	184.832.000,00	181.264.742,00	98,07
Pembinaan operasional dan pengembangan satuan linmas	Jumlah Satlinmas yang dibina	300 orang	300 orang	100	198.070.000,00	197.772.895,00	99,85

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan :

### **Keberhasilan :**

- a. Pengalihan kegiatan pelatihan dan simulasi diganti dengan rapat nkoordinasi dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.

**Kegagalan :**

- a. tidak terlaksananya pelatihan dan simulasi anggota satlinmas dan masyarakat akibat pandemic covid 19 dan refocusing anggaran;
- b. Masih banyaknya anggota linmas yang memiliki ketrampilan penanganan bencana;
- c. Kurangnya koordinasi antara perangkat desa/pamong desa kepada instansi terkait dengan penanganan tibumtranmas.

**Solusi:**

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi kesiapsiagaan satlinmas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana sebagai pengganti kegiatan simulasi dan pelatihan;
- b. Perlu dialokasikan dan didistribusikan dukungan dukungan sumber daya yang cukup bagi keperluan tercapainya share value tersebut melalui pelaksanaan kegiatan kelinmasan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah**

dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	100%	100%
Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ruang Lingkup penegakan peraturan perundang – undangan daerah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dengan langkah penindakan represif yustisial.

Bentuk pelaksanaannya diimplementasikan dengan penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelaku pelanggaran peraturan daerah.

Jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah melalui proses sidang tipiring pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

### Rekap Data Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pelanggar Protokol Kesehatan yang Bertempat Di GOR Sidoarjo Tahun 2020

No	Tanggal	Lokasi Sidang Tipiring	Jumlah Pelanggar Keseluruhan (orang)	Pelanggar mengikuti sidang (orang)	Pelanggar yang hadir sidang namun belum membayar denda (orang)	Jumlah Pelanggar yang tidak hadir sidang (verstek) (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	14 September 2020	Depan Poslantas Waru Jl. Raya Waru Sidoarjo	27	27	-	-
		Taman Asean Jl. Raya Pagerwojo Buduran	35	35	-	-
2	15 September 2020	Depan Ruko Square Garden Sidodadi	60	60	-	-
3	17 September 2020	Lapangan Tennis Graha Tirta Waru	105	105	-	-
4	21 September 2020	Kantor Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman	8	8	-	-
5	24 September 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	789	488	-	301
6	1 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	719	419	-	300
7	8 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	387	173	-	214
8	15 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	367	188	-	179

9	22 Oktober 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	704	323	-	381
10	5 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	912	442	-	470
11	12 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	509	196	-	313
12	19 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	574	247	-	327
13	26 November 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	618	288	-	330
14	3 Desember 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	562	284	-	278
15	17 Desember 2020	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	128	47	-	81
16	14 Januari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	595	287	-	308
17	28 Januari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	2,376	1,347	9	1.020
18	4 Pebruari 2021	Lapangan Tennis Indoor Gor Delta Sidoarjo	1,333	653	21	680
Jumlah Pelanggar			10.808	5.617	30	5.182

Realisasi Penyerapan Anggaran Yang Digunakan, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1.	BBM, Giat Covid 19	52.500.000,00	52.485.519,00
2.	Perjalanan dinas dalam daerah, Giat Covid 19	400.800.000,00	400.630.000,00
3.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	637.000.000,00	480.100.000,00
4.	Nasi Kotak, Giat Covid 19	825.480.000,00	824.340.000,00
5.	Bantuan Transport, Polres-	615.000.000,00	614.250.000,00

	Covid 19		
6.	Bantuan Transport, TNI Polri terkait penanganan covid 19	3.600.000.000,00	1.558.525.000,00
7.	Bantuan Transport TNI Covid 19	427.500.000,00	427.500.000,00
		6.558.280.000,00	4.357.830.519,00
		SALDO	2.200.449.481,00

Dasar Hukum yang digunakan dalam penanggulangan penyebaran covid-19 yang dijadikan acuan penindakan, antara lain :

1. Perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Perda No 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Covid 19 di kabupaten Sidoarjo.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
4. Keputusan Gubernur Jawa timur Nomor : 188/7/KPTSP/013/2013 tanggal 9 Januari 2021 tentang PPKM untuk pengendalian penyebaran corona virus Disease 2019.
5. Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor : 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019
6. Surat Edaran Nomor 440/189/438.1.1.3/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang PPKM untuk pengendalian dan penyebaran corona virus disease 2019.

Kegiatan operasi yustisi gabungan antara Polresta, kodim dan Satpol PP di laksanakan dalam rangka penerapan PSBB dan PPKM dan menekan pelanggaran protokol kesehatan serta penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo dimana dalam kegiatan operasi yustisi dan gabungan tersebut dikenakan sanksi/denda serta penyitaan kartu identitas/KTP, bahwa masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan akan melaksanakan sidang tipiring bertempat di GOR Indoor Sidoarjo Disamping melaksanakan operasi gabungan, Satpol PP juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang terjaring tidak menggunakan masker untuk selalu

menggunakan masker setiap keluar rumah serta pengelola usaha selalu mentaati peraturan protokol kesehatan (3M).

**Permasalahan :**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (3M).
2. Pelanggaran peraturan daerah hanya diberikan sanksi denda, tidak diterapkan sanksi kurungan.

**Solusi :**

1. Optimalisasi fungsi pengawasan, upaya preventif dan pembinaan berkaitan dengan pencegahan potensi pelanggaran perda .
2. Optimalisasi dan koordinasi dengan Instansi pendukung {Kejaksaan, Pengadilan Negeri (dalam penyelenggaraan siding)}

**Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai sasaran 2 didukung dengan program dan kegiatan sbb: Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 948.500.300,- dan terealisasi sebesar Rp.913.690.338,- atau 96,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah peserta pembinaan penegakan peraturan daerah	200	200	100	437.413.510,00	423.328.794,00	96,78
Fasilitasi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	Persentase penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah yang difasilitasi	100%	100%	100	511.086.790,00	488.752.297,00	95,63

**D. Realisasi Kinerja Sasaran 2**

Untuk mencapai sasaran 2 didukung dengan program dan kegiatan sbb: **Program Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp. 13.574.965.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.060.474.499,- atau 96,21 %, dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	PERSENTASE
Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	45	46	102%
Jumlah personil yang ditugaskan dalam upacara HUT dan Jambore	75	0	0%
Jumlah asset yang diamankan	3	3	100%

Penindakan terhadap gangguan tibumtranmas pada tahun 2020 fokus utamanya masih sama dengan tahun 2019 yaitu penertiban keberadaan bangunan liar dan sterilisasi lokasi dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini guna mendukung program-program yang dilakukan instansi/OPD teknis seperti pengendalian banjir, penataan parkir dan estetika kota.

Sebagai upaya lanjutan dari tahun sebelumnya, konsentrasi penertiban PKL terfokus pada Jl. Raya Gajah Mada, Jl. Raden Patah dan Jl. Sisingamangaraja. sepanjang Jl. Raya Waru dan Jl. Raya Porong, Jl. Raya Gading Fajar, Sepanjang Taman Pinang dan Pondok Jati serta area Gor dan Jl. Raden Patah. Khususnya upaya sterilisasi PKL yaitu memindahkan PKL ke tempat relokasi di lahan eks makam cina. Sedangkan penertiban bangli dilakukan di Jl. Raya Sumorame, Candi.

Pada tahun 2020 fokus kegiatan operasi dititikberatkan pada operasi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan, penyebaran Covid -19 dimana kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk patroli bersama berskala besar yang dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan Dinas Perhubungan, Polresta Sidoarjo dan Kodim 0186 dengan sasaran pedagang atau pemilik lapak yang melanggar ketentuan PSBB serta masyarakat yang berkunjung ke warung – warung/rumah makan dengan makan ditempat (tidak dibungkus atau dibawa pulang) dan masyarakat yang beraktifitas diluar tanpa menggunakan masker, serta masyarakat yang beraktifitas diluar penetapan jam malam, terhadap para pelanggar



dilakukan penindakan dengan cara kerja sosial sebagai upaya pembinaan dan menulis surat pernyataan untuk tidak mengulangi, Kegiatan patroli bersama berskala besar akan tetap dilakukan dengan penekanan penegakan PSBB melalui penindakan dan pemberian sanksi terhadap para pelanggar peraturan terkait pelaksanaan PSBB di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

**Permasalahan :**

1. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk turut menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketidakpatuhan pelaku usaha non formal dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama pada titik-titik lokasi yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.

**Solusi :**

1. Peningkatan intensitas dan optimalisasi penjagaan patrol dan penjagaan di titik – titik lokasi rawan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga tibumtranmas

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	45	46	102	11.861.486.900	11.411.936.546	96,21
Penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendali ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah personil yang ditugaskan dalam upacara HUT dan Jambore	75	0	100	45.000.000	0	0
Pengamanan kegiatan dan asset daerah	Jumlah asset yang diamankan	3	3	100	1.668.478.800	1.633.449.556	97,90

Untuk melaksanakan program Tibumtranmas dan penegakan Pereda dalam upaya kasus pelanggaran perda selama masa pandemic covid -19 dititik beratkan pada kegiatan penegakan perda berupa penegakan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penendalian penyebaran covid-19 melalui patrol Bersama dengan instansi samping terkait yakni, TNI/Polri, Organisasi Masyarakat dan Elemen masyarakat juga penegakan perda lainnya terkait usaha illegal, bangunan liar, permasalahan aset dan reklame.

### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan :**

#### **Keberhasilan :**

- a. Terlaksananya patroli bersama dengan instansi samping terkait TNI/Polri , elemen masyarakat dan organisasi masyarakat dalam penegakan peraturan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyebaran covid-19.
- b. Penanganan pengaduan masalah reklame dan bangli, PKL, Pekat, PMKS dengan cara humanis.

#### **Kegagalan :**

- a. Belum optimalnya patroli dalam pencegahan pandemic covid-19 karena keterbatasan personil dibanding luas wilayah, sehingga belum semua wilayah belum tersentuh penegakan peraturan daerah.

### **Analisis dan perbandingan kinerja dengan Instansi sejenis**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI INSTANSI SEJENIS	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT</li> <li>- Persentase pos kamling aktif</li> </ul>	100%	-	
			103%	-	
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan</li> <li>- Prosentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan</li> <li>- Prosentase titik-titik lokasi</li> </ul>	100%	93,90%	SATPOL PP PROPINSI JAWA TIMUR
			100%	92,15	

		yang bebas pelanggaran Perda	100%	-	
--	--	------------------------------	------	---	--

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja di tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa kinerja satpol pp Sidoarjo melebihi standart satpol pp propinsi jawa timur, hal ini disebabkan dalam melaksanakan kegiatan terhitung sejak januari sampai dengan desember 2020 telah dilaksanakan 102 kali kegiatan dengan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sejumlah 82 pelanggaran dan telah ditangani sejumlah 77 pelanggaran sehingga tingkat capaian nya lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Sidoarjo dimana semua jenis gangguan tibumtranmas semua di tindaklanjuti dan ditangani dengan baik. Sedangkan upaya penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan dari 33 kali kegiatan terdapat 293 kasus pelanggaran dengan penyelesaian sejumlah 137 kasus sehingga hanya bs mencapai kinerja sebesar 92,15 persen

## 5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Program dan Kegiatan Pendukung

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT</li> <li>- Persentase pos kamling aktif</li> </ul>	100%	Berhasil	Pencapaian target dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat. Secara eksplisit kegiatan dimaksud berupa Sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi keberadaan dan partisipasi satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran utama locus sosialisasi ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmasnya.
Program : Perlindungan Masyarakat	Prosentase anggota Satlinmas yang aktif dalam melaksanakan fungsi linmas	100%	Berhasil	Optimalisasi masing-masing Kegiatan dengan memaksimalkan keberadaan Koordinator Lapangan (KORLAP) yang membawahu beberapa kecamatan
<b>Kegiatan :</b>				Optimalisasi pengerahan satlinmas pada kegiatan persiapan dan pengamanan pilkada gubernur

a. Pengerahan dan pengendalian satuan linmas	Jumlah anggota Satlinmas yang aktif	100 %	Berhasil	jatim serta penanggulangan bencana
b. Pembinaan operasional dan pengembangan satuan linmas	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan	100%	Berhasil	Pembinaan kolektif dan pelatihan satlinmas seperti simulasi pengamanan pemilu dan simulasi tanggap bencana
c. Pembinaan potensi masyarakat dalam pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Satlinmas yang dibina	100 %	Berhasil	Optimalisasi pengarahan kepada masyarakat berkaitan tentang urgensi keberadaan satlinmas dan pos kamling
<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan</li> <li>- Prosentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan</li> </ul>	100%	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus penindakan pada keberadaan PKL dan Bangunan liar di sepanjang 9 jalur utama yaitu dari batas utara Jl. Raya Waru sampai dengan Batas selatan Jl. Raya Porong.</li> <li>- Optimalisasi penindakan tersebut berefek pada peningkatan prosentase wilayah atau lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah. Dalam hal ini dapat dilihat secara real di lokasi – lokasi seperti Jl. Gajah Mada, Jl.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda</li> <li>- Persentase penanganan pelanggar protokol Kesehatan yang diselesaikan</li> </ul>	100%	Berhasil	Mojopahit, Jl. Sisingamangaraja dan Jl. Raden Patah.
<b>Program :</b>				
Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan wilayah patroli</li> <li>- Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindak</li> <li>- Persentase kondisi aman dalam pengamanan kegiatan dan aset daerah</li> <li>- Nilai Survey Kepuasan</li> </ul>	18 Kec 100% 100% 100%	Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil	Optimalisasi masing-masing Kegiatan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Nilai SKM mengalami peningkatan disebabkan obyek layanan yang dilayani mengalami perubahan yaitu RHU (rumah hiburan umum), café, restoran, warkop. Dan berdasarkan nilai SKM tahun 2019 yaitu 86,87 memuaskan naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 86.15

	Masyarakat terhadap pelayanan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			
<b>Kegiatan :</b>				
a. Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3. Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	Berhasil	Optimalisasi penertiban PKL dan bangunan liar serta patroli cipta kondisi pasca penertiban
	4. Jumlah Patroli yang dilakukan	97,26%	Berhasil	
b. Penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendali ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka upacara dan jambore	Jumlah Penghargaan yang diperoleh	100%	Berhasil	Penghargaan yang diperoleh dalam rangka HUT Satpol PP dan Jambore yang diperoleh dalam ajang kompetisi dimana satpol pp kabupaten Sidoarjo mendapatkan juara 2 tingkat propinsi jawa timur dalam lomba kerapian dan ketertiban pasukan. Juara 1 lomba hiking jamboree satpol pp se jatim ke 17 tahun 2019 serta juara 3 lomba jembatan bamboo pada pekan jamboree jatim ke

				17 tahun 2019
c. Pengamanan kegiatan dan aset daerah	1. Jumlah kegiatan daerah yang diamankan 2. Jumlah aset daerah yang diamankan	103 100%	Sangat Berhasil Berhasil	Optimalisasi pengamanan terhadap kegiatan atau seremonial yang diselenggarakan Pemkab Sidoarjo
<b>Program :</b> Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	Berhasil	Penindakan pro yustisial seperti persidanagn tindak pidana ringan terhadap pelanggar peraturan daerah
<b>Kegiatan :</b> a. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	3. Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan 4. Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang ditemukan dan	90 100%	Cukup Berhasil	Optimalisasi pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi dan telah melakukan pelanggaran perda



	ditindaklanjuti			
b. Fasilitasi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	Persentase penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah yang difasilitasi	100%	Berhasil	Peningkatan penyelidikan dan penindakan pro yustisial guna mendukung penindakan gangguan tibumtranmas

### 3.4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Penyediaan jasa surat menyurat	3.400.000,00	3.000.000,00	88,24
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	427.000.000,00	332.499.519,00	77,87
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	160.900.000,00	155.638.000,00	96,73
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	41.519.900,00	69,20
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	175.740.000,00	164.818.548,00	93,79
	Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi	383.720.000,00	380.280.640,00	99,10
	Penyediaan alat tulis kantor	39.804.000,00	39.554.000,00	99,37
	Penyediaan barang cetakan dan	17.826.000,00	14.230.000,00	79,83

	penggandaan			
	Penyediaan bahan logistik kantor	703.025.000,00	701.400.000,00	99,77
	Penyediaan makanan dan minuman	29.500.000,00	27.345.000,00	92,69
	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	2.558.685.000,00	2.217.940.003,00	86,68
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PD	40.000.000,00	38.214.000,00	95,54
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Pembangunan gedung kantor	646.596.000,00	629.472.000,00	97,35
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.512.200.000,00	1.422.226.950,00	94,05
	Pengadaan meubeleur	67.000.000,00	61.204.000,00	91,35
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	163.750.000,00	155.389.840,00	94,89
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	315.000.000,00	291.818.000,00	92,64
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	475.000.000,00	474.725.000,00	99,94
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	88.770.000,00	87.945.000,00	99,07
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	38.280.000,00	37.950.000,00	99,14
	Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	446.425.000,00	418.025.250,00	93,64
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	46.725.000,00	32.515.000,00	69,59

	Daya Aparatur			
	Pendidikan dan pelatihan non formal	46.725.000,00	32.515.000,00	69,59
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja OPD	11.263.000,00	0,00	0,00
<b>Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b>	Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	4.096.601.000,00	3.811.927.920,00	93,05
	Penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendali ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	75.400.000,00	75.315.000,00	99,89
	Pengamanan kegiatan dan aset daerah	2.491.180.000,00	2.487.802.360,00	99,86
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah</b>	Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	310.975.000,00	310.866.080,00	99,96
	Fasilitasi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	482.450.000,00	457.725.000,00	94,88
<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	Pengerahan dan pengendalian satuan linmas	100.250.000,00	98.150.000,00	97,91
	Pembinaan operasional dan satuan linmas	153.975.000,00	116.050.000,00	75,37
	Pembinaan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan	529.875.000,00	529.075.000,00	99,85

**Berdasarkan target dan realisasi belanja menurut program Tahun 2020 adalah sebagai berikut :**

No	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	12.039.566.809	11.254.781.801	93,48
2	Belanja Langsung	15.380.245.545	13.966.769.551,36	90,81
3	Program Pelayanan Kesekretariatan	8.664.475.960	7.508.699.332,20	86,66
4	Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.609.871.240	5.424.328.791,68	96,69
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per UU an	605.072.120	582.865.202,48	96,33
6	Program Perlindungan Masyarakat	500.826.225	450.876.225	90,93
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.419.812.354</b>	<b>25.221.551.352,36</b>	<b>91,98</b>

Pada tahun 2020 dalam program pelayanan kesekretariatan terdapat kegiatan penyediaan barang/jasa perkantoran serta kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Pada kegiatan tersebut diatas mengalami beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dimana pada kegiatan penyediaan barang /jasa perkantoran terdapat belanja listrik air dan telepon serta internet dimana belanja tersebut besarnya berdasarkan tagihan bulanan yang nilainya tergantung pada pemakaian sementara itu disatu sisi di satpol pp sedang mengupayakan untuk melakukan penghematan pemakaian tenaga listrik air dan telepon. Namun hal ini tidak mempengaruhi dari pencapaian target yang telah di tentukan dalam perencanaan. Pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran terdapat pengadaan kendaraan bus yang memiliki penyerapan rendah dikarenakan pagu anggaran yang terbatas sehingga mengakibatkan sisa kelebihan anggaran yang cukup besar sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan.

### 3.5. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT</li> <li>- Persentase pos kamling aktif</li> </ul>	100.250.000,00	97,91
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan</li> <li>- Prosentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan</li> <li>- Prosentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda</li> </ul>	5.609.871.240	96,69

### 3.6. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	- Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT	1 : 1,1	1 : 1,1	100%	500.826.225	450.876.225	90,93 %
	- Persentase pos kamling aktif	32%	33%	103%			
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	- Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	100%	100%	5.609.871.240	5.424.328.791,68	96,69 %
	- Prosentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan						
	- Prosentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda						

### 3.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT</li> <li>- Persentase pos kamling aktif</li> </ul>	100%	94,79%	5,21%
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan</li> <li>- Prosentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan</li> <li>- Prosentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda</li> <li>- Persentase penanganan pelanggar protokol Kesehatan yang diselesaikan</li> </ul>	100%	96,28%	3,72%

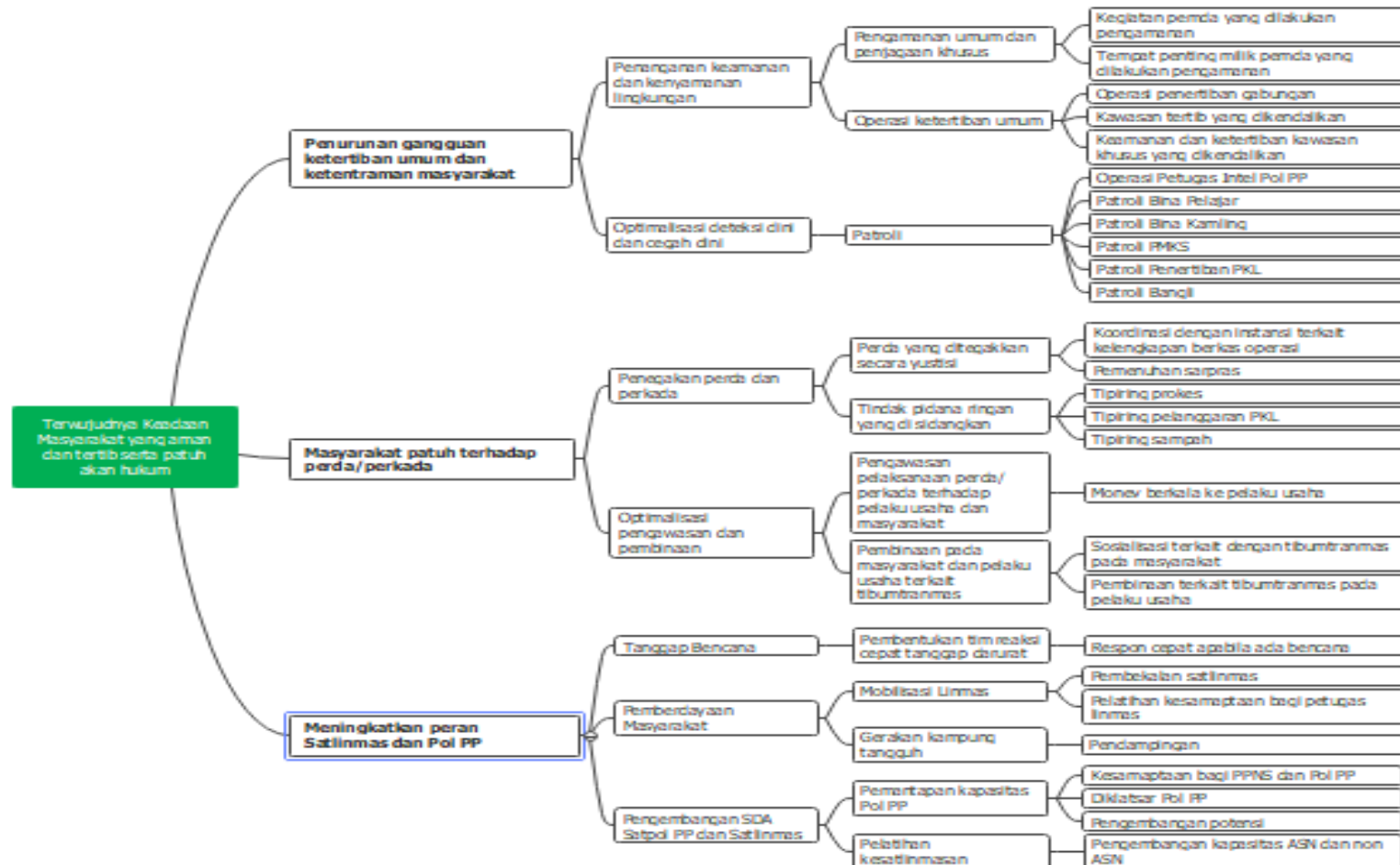
## **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut dapat disampaikan bahwa terdapat indikator kinerja yang efektif tercapai 100% dan indikator kinerja yang efisien dalam penggunaan anggaran.

Tahun anggaran 2020 dalam program pelayanan kesekretariatan terdapat kegiatan penyediaan barang/jasa perkantoran serta kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Pada kegiatan tersebut diatas mengalami beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dimana pada kegiatan penyediaan barang/jasa perkantoran terdapat belanja listrik, air, telepon dan internet dimana belanja tersebut besarnya ditentukan berdasarkan tagihan bulanan yang nilainya tergantung pada pemakaian. Sementara itu disatu sisi di Satuan Polisi Pamong Praja sedang diupayakan untuk melakukan penghematan pemakaian tenaga listrik, air dan telepon. Namun hal ini tidak mempengaruhi pencapaian target yang telah dilakukan dalam perencanaan. Pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, terdapat pengadaan kendaraan bus yang memiliki penyerapan rendah dikarenakan pagu anggaran yang terbatas dimana kalo dipakai untuk membeli bus ukuran sedang harganya kurang sehingga dibelikan bus ukuran kecil. Hal ini mengakibatkan sisa kelebihan anggaran yang cukup besar sehingga mempengaruhi tingkat serapan. Namun terkait hasil target dan indikator kegiatan masih tercapai.



## 9. POHON KINERJA



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah perlu melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKJIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi public sendiri, LKJIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan dan baik.

### **4.1. KESIMPULAN UMUM**

Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan semua program dan kegiatan pada Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya sasaran strategis organisasi, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Dari 2 indikator kinerja utama (IKU) pada 6 sasaran strategis yang ditetapkan sebagai target kinerja organisasi pada tahun 2020, semua target yang sudah ditetapkan tercapai dengan kategori baik.

Indikator kinerja program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 ada sejumlah 6 indikator. dari 6 indikator tersebut, 5 diantaranya bisa mencapai target kinerja (realisasi kinerja 100%) dan memiliki predikat pencapaian berhasil. Sedangkan hanya ada 1 indikator yang dinilai sangat berhasil.

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target pada masing masing indikator secara umum adalah : 1) perencanaan dan penanganan yang baik, 2) dana yang mencukupi, 3) tercukupinya jumlah dan kapasitas personil yang melaksanakan program/kegiatan tersebut, 4) sarana dan prasarana kerja yang mencukupi, 5) animo masyarakat dalam mendukung kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dan pembentukan satuan keamanan lingkungan sehingga masyarakat melakukan swadaya.

Sementara itu kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator dan yang juga menyebabkan rendahnya pencapaian fisik dan penyerapan keuangan sehingga menyebabkan tidak efisiennya kinerja program/kegiatan secara umum adalah 1) tidak baiknya perencanaan dan penganggaran pada beberapa kegiatan 2) kurangnya kemampuan personil yang melaksanakan kegiatan tersebut.

## 4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang sudah diuraikan pada Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2020. Upaya ini juga mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Namun demikian beberapa hal perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ke depan. Pertama walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan tantangan ini terutama Nampak dalam kondisi terkait berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dimana masih terdapat berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kondisi ketentraman dan ketertiban yang tidak kondusif dikarenakan konflik antar masyarakat, konflik antar kepentingan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara dengan menyediakan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kedua sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun demikian harus ada rencana tindak lanjut dan dilanjutkan dengan upaya konkret untuk melaksanakan perbaikan dalam berbagai hal sehingga menjadikan LKJIP benar benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk dipergunakan sebagai dasar peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan public. Seluruh personil di Satuan Polisi Pamong Praja harus saling mendukung untuk terciptanya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang tentunya dengan dukungan penuh dan pengawalan ketat oleh pimpinan OPD.

Terkait kegagalan dalam mencapai target/sasaran indikator kinerja program dan kinerja kegiatan ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti secara nyata pada tahun mendatang:

1. Perencanaan kinerja yang lebih detail, baik pada tingkat kegiatan, juga perencanaan pada tingkat instansi dengan memperhatikan aspek sumber daya

2. Perlu kesinambungan dan keselarasan antara perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi hingga pelaporan kegiatan
3. Diperlukan koordinasi yang baik antar personil di dalam OPD, juga koordinasi dengan OPD lain bahkan dengan instansi vertical yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung dan berujung pada tercapainya kinerja organisasi

Tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini diharapkan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sidoarjo.

**Mengetahui**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SIDOARJO**

**WIDIYANTORO BASUKI, SH**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19660228 199602 1 001**